

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daya saing ekonomi merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, karena tercapainya pembangunan ekonomi tidak akan terlepas dengan daya saing, selain itu daya saing ekonomi memiliki ketergantungan antara kondisi kesejahteraan, inovasi dan investasi. Karena pada dasarnya daya saing ekonomi terutama pada daerah bertujuan untuk memberikan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yaitu dengan cara mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberlangsungan pembangunan ekonomi berusaha untuk menciptakan suatu pemerataan pendapatan wilayah serta kualitas sumber daya manusia yang akan mendorong pembangunan ekonomi dengan hasil yang di harapkan adalah kesejahteraan bagi masyarakat yang lebih baik serta peningkatan daya saing. Dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi yaitu dengan melakukan pengembangan dalam sektor yang berpotensi, terlebih dalam sektor yang banyak menyerap tenaga kerja serta menghasilkan kontribusi ekspor nya tinggi dengan di dukung oleh teknologi dan peningkatan sumber daya manusianya, hal ini guna mendorong landasan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan daya saing ekonomi yang memacu pada ekonomi global (Sukanto, 2009).

Saat ini, era globalisasi mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi tinggi secara tidak terbatas, baik di kawasan nasional bahkan internasional. Negara

Indonesia telah memperkenalkan kelompok pembangunan yang dikenal dengan nama Pembangunan Nasional. Kemajuan nasional Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu terciptanya jaminan sosial, yang mana akan mendorong dalam peningkatan daya saing ekonomi.

Era penerapan kebijakan fiskal dan otonomi daerah menempatkan pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia menghadapi permasalahan dalam pengembangan perekonomian daerah. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban mempersiapkan daerahnya untuk membangun perekonomian yang berdaya saing. Kapasitas daerah dalam merumuskan kebijakan yang berbeda juga penting untuk mencapai daya saing ekonomi. Selain itu, untuk mengembangkan daya tarik suatu daerah dan memenangkan persaingan, penting bagi daerah tersebut untuk mengembangkan infrastruktur fisik dan sumber daya manusianya. Suatu daerah juga harus mampu menggambarkan pemanfaatan berbagai faktor yang menentukan daya saing perekonomian daerah tersebut dan daerah lainnya (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, 2007).

Pembangunan daerah menjadi bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mengembangkan dan menyeimbangkan laju pertumbuhan antar daerah, maka dalam pembangunan daerah penting untuk memaksimalkan pemanfaatan kawasan lokal sebaik-baiknya karena penyelenggaraan pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional yang berupaya mengembangkan daerah dan menyelaraskan laju pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Indonesia. Setiap wilayah atau masing-masing daerah memiliki reaksi yang beragam dan berbeda beda dalam menanggapi persaingan global. Hal ini

terjadi karena adanya tuntutan daerah yang menyebabkan meningkatnya persaingan nasional di era globalisasi Tantangan dalam peningkatan kualitas dan sumber daya lokal.

Secara tidak langsung desentralisasi fiskal atau otonomi daerah memiliki hubungan yang saling terikat dan memiliki hubungan dengan daya saing ekonomi terlebih pada pelaksanaan pembangunan, yang dimana Pembangunan yang perlu dicapai adalah pembangunan yang *Dynamic* demi kemajuan daerah. Daerah harus mencari dan mewujudkan potensi pertumbuhannya melalui inovasi dan produktivitas yang tinggi, maka di sinilah peran daya saing sangat diperlukan, terlebih daerah dapat memanfaatkan sektor yang memiliki potensi pada daerahnya tersebut seperti dengan memilah menjadi sektor basis dan non basis sehingga pemerintah daerah dapat mengetahui prioritas dalam mengembangkan pembangunan ekonomi pada wilayahnya tanpa mengesampingkan pembangunan pada sektor lainnya.

Otonomi daerah memiliki peran penting dalam suatu pembangunan ekonomi, karena merupakan suatu istilah yang dapat di jadikan sebagai tolak ukur dalam sistem pemerintahan guna membangun daerah, karena dengan kewenangannya dapat menyalurkan aspirasi serta implementasi yang baik maka pembangunan dapat terlaksanakan dengan maksimal. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan otonomi daerah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, memberikan kebebasan dalam menerapkan kebijakan, memberikan

kewenangan yang lebih luas, jelas dan bertanggung jawab yang di berikan pada pemerintah daerah.

Secara tidak langsung masyarakat lebih dekat dan mendapatkan akses yang jelas dalam pengontrolan pemerintah daerah ketimbang pemerintah pusat, karena pemerintah daerah secara geografis lebih dekat dengan masyarakat sehingga dapat memahami segala kebutuhan masyarakat dan aspirasi daerah, oleh karena itu otonomi daerah ini memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat yang di serahkan pada pemerintah daerah untuk melaksanakan sebagian besar pelayanan masyarakat serta pemerintah daerah dapat meningkatkan daerahnya secara lebih mandiri dengan cara melihat dan mengembangkan potensi yang ada di daerahnya sesuai dengan kemampuan individu dan kemampuan masyarakatnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi pada tahap daerah dapat lebih maksimal.

Daya saing ekonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk mengembangkan sektor unggulan sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya, serta mengatur sarana dan prasarana untuk mengembangkan sektor potensial tersebut. Untuk memperkuat daya saing ekonomi daerah, pemerintah dan pihak lain mencoba membangun lingkungan pendukung yang memampukan ekonomi tumbuh, mengembangkan sektor basis ataupun unggulan sesuai dengan potensi dan kekayaan, dan mengatur sarana dan prasarana untuk merubah pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan sarana dan prasarana melalui *workshop* dan pelatihan. Melemahnya daya saing Indonesia tidak lepas dari belum meratanya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah, terutama dari sisi perekonomian yang masih terdapat kesenjangan kesejahteraan. Kesejahteraan masyarakat akan

terjamin jika pendapatan per kapita atas dasar harga konstan terus meningkat. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didasarkan pada harga konstan dan berlaku merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu daerah (Kusuma & Sirman, 2023).

Kabupaten Majalengka merupakan salah satu dari wilayah yang berada di Provinsi Jawa Barat, kabupaten Majalengka pada saat ini menjadi salah satu pusat perhatian, hal ini di dasari karena Kabupaten Majalengka merupakan suatu wilayah yang memiliki berbagai potensi yang potensial dengan keadaan geografisnya dan seperti yang di katakan oleh bapak Ridwan kamil mantan gubernur Jawa Barat saat usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kabupaten Majalengka, Kabupaten Majalengka akan menjadi wajah baru Jawa Barat sebagai pusat ekonomi dalam kurun waktu beberapa waktu beberapa tahun ke depan karena adanya pengembangan kawasan industri Metropolitan Rebana (BAPPEDA JABAR, 2023).

Wilayah Metropolitan Rebana adalah wilayah metropolitan yang terletak di provinsi Jawa Barat, yang meliputi tujuh daerah, yakni Kabupaten Sumedang, Majalengka, Cirebon, Subang, Indramayu, dan Kuningan, serta Kota Cirebon. Tujuan pengembangan Kawasan Rebana yaitu agar terwujudnya Kawasan Rebana sebagai motor pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bagian timur-utara berbasis pada pengembangan investasi yang terintegrasi, inovatif, kolaboratif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan. yang memiliki keterkaitan fungsional dan berbasis aglomerasi kegiatan ekonomi, aglomerasi aktivitas sosial masyarakat, aglomerasi lahan terbangun, dan aglomerasi penduduk minimal satu juta jiwa. Kawasan tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan perekonomian sebesar

7,16%, membuka peluang 4,39 juta lapangan kerja, dan meningkatkan investasi melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 7,77% pada tahun 2030 (*BAPPEDA JABAR*, 2023). Hal ini terbukti dengan perkembangan pembangunan ekonomi dalam berbagai insfastruktur. Salah satu dari pembangunan yang terjadi yaitu bandara internasional Kerta Jati dan jalan tol Cisumdawu.

Kabupaten Majalengka memiliki peran penting dalam mendukung ekonomi Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Majalengka memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat dapat dilihat melalui berbagai lapangan usaha, salah satunya yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi masing-masing sebesar 22% dari total PDRB Kabupaten Majalengka. Sektor industri pengolahan juga memiliki kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 14,54% pada tahun 2016 dan 22,32% pada tahun 2020. Selain itu, sektor jasa pendidikan juga berlaku sebesar 7% terhadap total PDRB Kabupaten Majalengka.

Tabel 1.1
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen), 2018-2022

Wilayah Jawa Barat	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kuningan	6,43	6,59	0,11	3,56	5,53
Cirebon	5,02	4,68	-1,08	2,47	4,09
Majalengka	6,48	7,77	0,89	4,75	6,63
Sumedang	5,79	6,33	-1,12	3,17	5,03
Indramayu	1,34	3,20	-1,58	0,58	2,88
Subang	4,41	4,61	-1,15	2,18	4,21
Kota Cirebon	6,20	6,29	-0,98	3,05	5,10

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

Laju pertumbuhan PDRB dapat dijadikan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. PDRB merupakan potret perekonomian suatu daerah, yang menyajikan gambaran jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah. PDRB dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan.

Dapat diamati dari tabel di atas bahwasannya Kabupaten Majalengka memiliki laju pertumbuhan yang cenderung lebih baik dan berada di barisan paling tinggi ketika dibandingkan dengan daerah-daerah yang termasuk ke dalam wilayah Metropolitan rebana dengan angka 6,63% pada tahun 2022, serta Kabupaten Indramayu yang memiliki laju pertumbuhan PDRB paling rendah di wilayah rebana ini. Meskipun pada 2020 Kabupaten Majalengka mengalami penurunan yang mana hal tersebut di akibatkan oleh terjadinya covid 19, namun kabupaten majalengka masih tetap bisa melanjutkan aktivitas perekonomiannya meskipun pada 2020 hanya memiliki angka laju pertumbuhan PDRB sebesar 0,89 dan pada tahun 2021-2022 terus mengalami peningkatan dan tetap mendominasi.

Pada dasarnya Kabupaten Majalengka memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang stabil serta cenderung mendominasi hal ini tandanya wilayah tersebut memiliki pembangunan ekonomi yang baik, maka hal tersebut harus terus di pertahankan bahkan di tingkatkan. Pemanfaatan sektor ekonomi dengan menggunakan pendekatan sektor basis (sektor yang berdaya saing tinggi) dan non basis dengan tujuan memprioritaskan pembangunan pada sektor ekonomi yang menjadi sektor basis di Kabupaten Majalengka sesuai dengan kondisi dan potensi

yang ada dengan melihat karakteristiknya, hal ini dapat dijadikan sebagai strategi bagi pemerintah dalam meningkatkan daya saing serta pembangunan ekonomi dalam mempersiapkan wajah baru Jawa Barat.

Dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Majalengka mengalami kenaikan hal ini dapat di katakan menjadi suatu hal yang positif bagi Kabupaten Majalengka meskipun kenaikannya tidak begitu besar. Jika diamati ada beberapa sektor yang mendominasi pada lima tahun terakhir ini serta besarannya berbeda beda, seperti pada tahun 2018 di dominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran dengan angka sebesar 4.467.860,40 dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 4.080.044,65. Sektor perdagangan besar dan eceran ini hanya mendominasi selama 2018-2019 hingga pada tahun 2020-2022 di dominasi oleh sektor industri pengolahan meskipun pada tahun 2020 di Indonesia terjadi pandemi covid 19 yang mana tidak begitu berdampak bagi PDRB Kabupaten Majalengka, hal tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa sektor yang mengalami kenaikan salah satunya sektor industri pengolahan yang terus mengalami peningkatan hingga 2022 dan menjadi sektor yang mendominasi dari sektor-sektor lain dengan angka sebesar 6.173.712,69. Hal ini dapat di lihat dari tabel di bawah yang menunjukkan ada 17 sektor menggambarkan bagaimana kondisi ekonomi Kabupaten Majalengka selama 2018-2022.

Tabel 1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Majalengka Menurut
Lapangan Usaha 2018-2022 (juta rupiah)

Sektor Ekonomi	2018	2019	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.080.044,65	4.119.332,37	4.117.084,57	4.152.808,92	4.388.830,50
B. Pertambangan dan Penggalan	398.156,75	382.994,56	380.757,07	380.937,13	380.664,20
C. Industri Pengolahan	3.550.305,10	4.455.071,80	4.868.760,48	5.447.301,53	6.173.712,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	16.437,40	17.385,47	19.757,48	22.581,65	25.168,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11.081,80	12.151,95	14.335,35	16.953,77	19.498,46
F. Konstruksi	3.687.514,20	3.952.981,49	3.764.137,59	4.170.900,57	4.428.337,87
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	4.467.860,40	4.776.642,33	4.600.317,46	4.821.564,99	5.183.571,93
H, Transportasi dan Pergudangan	1.102.792,12	1.204.613,76	1.161.084,95	1.187.180,90	1.364.746,68
I, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	871.002,90	949.373,19	925.088,14	943.267,22	1.080.190,51
J, Informasi & komunikasi	818.257,38	875.930,47	1.156.100,02	1.226.678,17	1.277.962,12
K, Jasa Keuangan dan Asuransi	576.695,70	603.051,27	611.875,29	631.871,12	636.315,93
L, Real Estate	268.035,66	291.965,34	294.050,62	318.805,26	338.550,15
M,N, Jasa Perusahaan	71.421,90	76.313,02	68.549,41	70.674,97	77.468,16
O, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	631.114,60	648.241,33	622.869,93	612.568,81	605.996,91
P, Jasa Pendidikan	1.146.933,60	1.204.867,62	1.220.914,23	1.238.966,83	1.303.364,05
Q, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215.907,50	229.384,55	235.109,30	250.703,88	263.313,22
R,S,T,U Jasa Lainnya	586.149,90	625.046,68	589.200,36	618.525,86	700.666,21
PDRB	20.006.878,91	21.561.720,42	21.754.535,01	22.788.754,26	24.300.774,06

Sumber: BPS Kabupaten Majalengka

Dapat di artikan bahwasanya sektor yang menjadi suatu potensi pada suatu wilayah dapat berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu hal ini menunjukkan apakah sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran akan terus

menjadi sektor yang mendominasi dalam jangka panjang atau di masa depan sektor tersebut mengalami reposisi menjadi sektor pendukung sektor unggulan dan ada sektor lain yang lebih tepat untuk dijadikan fokus pemerintah dalam strategi kebijakan pembangunan ekonomi dan menciptakan daya saing di Kabupaten Majalengka. Maka dari itu, perlu adanya penelitian sektor basis dan non basis dengan metode *Location Quotient* (LQ) dan *Dynamic Location Quotient* (DLQ) agar proses perencanaan pembangunan sektor ekonomi unggulan dapat tercipta, karena sektor basis yang menjadi unggulan tersebut dapat menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan ekonomi wilayah. Dengan demikian strategi perencanaan pembangunan dilakukan berdasarkan potensi sektoralnya tanpa mengesampingkan pembangunan sektor lain yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka, hal ini guna mempersiapkan pengembangan kawasan Metropolitan Rebana beberapa tahun ke depan.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Daya Saing Ekonomi dengan pendekatan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Sektor apakah yang menjadi sektor basis (sektor yang berdaya saing tinggi) di Kabupaten Majalengka pada Tahun 2018-2022?
2. Bagaimana pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022?

3. Bagaimana klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan yang hendak dicapai, sebagai berikut:

1. Mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor basis (sektor yang berdaya saing tinggi) di Kabupaten Majalengka tahun 2018-2022
2. Mengetahui pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022
3. Mengetahui klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Majalengka Tahun 2018-2022

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi berbagai pihak manapun, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu tambahan ilmu pengetahuan dan informasi yang dapat di jadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis tentang sektor unggulan di Kabupaten Majalengka dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat

untuk mendapatkan gelar sarjana pada jurusan Ekonomi Pembangunan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian diharapkan ini dapat menjadi suatu informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan kebijakan untuk perencanaan pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat melalui data yang di peroleh dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Majalengka.

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan Mei 2024.

